

## **GENDER DALAM SATU DEKADE MASA TRANSISI REFORMASI TAHUN 1998-2008**

**Teuku Muzaffarsyah**

Program Studi Ilmu Politik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Malikussaleh

### **• Latar belakang masalah**

Satu dekade berjalan transisi pemerintahan telah menunjukkan banyak perubahan, terutama sekali masalah persamaan hak wanita atau apa yang sudah dikenal dengan istilah gender. Konstruksi gender ini telah sekian lama di politisir secara sistemik dimasa pemerintahan orde baru. Media masa juga sangat andil dalam mengkonstruksi gender, sebagai mana dijelaskan Erianto dalam survey (2000), image kaum wanita selalu digambarkan sebagai wanita berambut panjang dan berkulit putih. Diskriminasi ini ikut mendorong terbentuk wacana sosial ditengah masyarakat dan tidak mencerminkan budaya lokal dengan segala keunikan entitasnya. Kencedrungan media masa dalam mengkonstruksikan wanita sebagai eksploitasi kapitalis. Wanita adalah modal yang eksotis untuk ditampilkan, sehingga sangat *marketable* dimata publik (liza,ed,2004:Erianto,2000:294).

Apa yang terjadi dimasa ini adalah bentukan dari konstruksi social yang dibangun sejak lama dimasa Orba, bahkan tidak hampir satupun Undang-Undang yang terdapat dalam peran wanita dalam pembangunan kecuali dalam ketertiban kaum wanita dalam mempolitisasinya. Disisi kaum itu digambar sebagai sosok wanita

meladeni suami sebagai pedamping, terutama bagi bersuai pejabat. Disisi lain kaum wanita di organisir secara structural seperti Dharmawanita bagi yang bersuamikan PNS, dan pada pemerintahan tingkat kecamatan yang diorganisasikan dalam PPK (Pemberdayaan Kesehatan Keluarga) yang digerakkan Ibu-Ibu pejabat pemerintah –Ibu Camat- dan beserta anggotanya; istri para pengurus desa, ibu-pak lurah.

Aktivitas kaum ibu ini tidak mendapat perhatian yang simpatik dari banyak kalangan kaum ibu atau para wanita di perkotaan atau pedesaan. Karena identitas para Ibu-Ibu pejabat ini yang merupakan kepanjangan tangan dari Dharmawanita, terkesan inklusif. Hal ini selalu, menjadi superioritas bagi wanita lain. Disamping itu, aktifitasnya tidak menyentuh masalah dasar bagi kaum wanita pada umumnya. Pertama, masalah pendidikan bagi wanita produktif. Kareana sejak tahun 1960-an sampai tahun 2000-an masyarakat yang buta huruf masih berjumlah jutaan. Kedua, tingkat pengangguran bagi wanita paling tinggi. Ketiga, pemberdayaan kesehatan yang tak menyentuh gaya hidup sehat dalam keseimbangan ekonomi. Hal ini terlihat pada ketidakharmonisan keluarga dalam hal

konsumsi makanan yang layak dan terpenuhinya standar gizi. Dan kesehatan bagi kaum ibu khususnya yang tidak bisa membatasi jarak kelahiran, sehingga mempunyai resiko tinggi bila melahirkan. Lebih jauh dijelaskan mantan aktivis Gender Wardah Hafiz (Direktur Urban Consortium Poor Jakarta), kaum wanita adalah pilar pembangunan masyarakat demokratis, yang diawali dengan keharmonisan keluarga dalam mengisyaratkan terpenuhinya sumber ekonomi keluarga.

Dari ketiga poin di atas, terlihat hamper tidak ada ruang peningkatan dan pemberdayaan bagi kaum wanita secara signifikan. Sebaliknya, wanita tersub-ordinasi dari pembangunan nasional. Gerakan Keluarga Berencana (KB), menistakan bagi kaum ibu, karean bentuk, pil, spiral dan suntik memiliki efek yang beragam bagi wanita. Salah satunya mengakibatkan pengumpulan hormon bagi wanita dan tersendatnya pembuluh sel darah putih, sehingga berdampak kegemukan badan. Demikian juga mengakibatkan infeksi iritasi kulit. Namun, perjalanan panjang kondisi wanita ini dalam tak berdaya dimasa kejayaan pemerintahan Orde Baru berakhir dengan kejatuhan pemerintahan Soeharto tahun 1998. Dengan terbukanya kran demokrasi, memudahkan berbagai kelompok untuk menata dan mengatur keterlibatan wanita dalam kesetaraan dan kesamaan hak pada kaum Laki-Laki. *Equality citizenship*, dalam konvensi PBB tahun 2000. Sejal tahun 1998, terdapat banyak (hampir puluhan) lembaga swadaya masyarakat (LSM). LSM ini mendorong dan menggerakkan peran wanita dalam pembangunan

untuk ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Nino Supeli, salah satu pendiri lembaga suara ibu peduli (SIP), LSM ini berada di Jakarta, yang ikut mengorganisir para ibu pinggiran kota Jakarta untuk turun ke jalan menuntut, turunkan harga susu.

Bisa dipahami, di era ini, wanita paling banyak mendapat pendidikan dari keluarga mampu. Sebaliknya, wanita yang berada dalam keluarga tak mampu, umumnya, bekerja di sector perindustrian, pabrik, manufaktur, dan sebaliknya menjadi tenaga kerja wanita. TKW ini menyebar ke beberapa Negara, seperti : Malaysia, Korea, dan Negara Timur Tengah. Akses ini tidak jarang menimbulkan *human trafficking*, perdagangan manusia khususnya para wanita usia produktif menjadi korban seksual. Mereka selalu diperjual belikan agen tenaga kerja wanita, tak sedikit pulang ke Indonesia dengan kondisi mengenaskan, teraniaya dan tersiksa oleh majikan atau keluarga nya. Hukum lintas Negara tidak menjamin perlindungan bagi tenaga kerja wanita (TKW) dan bahkan pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa dalam mengadvokasi para korban dalam merehabilitasi korban TKW.

Pilihan ini tidak bisa dielakkan bagi wanita pengangguran dan usia produktif, selain mencari dolar di luar negeri. Rasa frustrasi ini terlihat dengan pilihan rasional ekonomi "*lebih baik hujan batu di negeri seberang dari pada hujan emas di negeri sendiri*", meskipun tersiksa di negeri orang namun gaji berlipat-ganda bahkan bisa sebanding dengan gaji PNS dengan setingkat jabatan kepala dinas di Kabupaten, dari bekerja di negeri

sendiri namun seperti mencari butiran emas di sungai.

Deskripsi diatas menjelaskan rasionalitas bagi kaum wanita pada umumnya yang berada di kota pinggiran. Tak ada ubahnya seperti pilihan rasional bagi orang sakit yang mau tak mau harus sembuh dengan menelan pil, 'tidak ditelan sayang ditelan pahit'. Terbukti dari data yang dihimpun lembaga Komnas perempuan dan jurnal wacana perempuan, menurut Gadis Arivia, "Negara harus mampu dan menjamin keselamatan TKW, karena Negara dapat keuntungan besar atas peran TKW, terutama atas pendapatan devisa Negara. Dengan adanya TKW dapat membawa uang dalam mata uang asing".

Sementara wanita yang bekerja di sektor perbankan, BUMN, lembaga Tinggi Negara, mereka dari keluarga yang mampu. Pemetaan ini penting untuk menjelaskan lebih jauh ketimpangan politik, ekonomi, budaya dan sosial. Hal yang sering diabaikan selama masa Orba adalah peran wanita tidak pernah sampai puncak jabatan tinggi Negara. Seperti kehakiman, kepolisian, TNI bahkan lembaga kementerian.

Di masa Orba dalam pertumbuhan ekonomi pemerintahan tidak diikuti dengan wanita. Ketimpangan akses terhadap pembangunan bagi wanita masih cukup memprihatinkan. Data bidang pendidikan, angka buta huruf usia kurang 15 tahun, perempuan sebesar 45 persen dan laki-laki 23 persen (UNDP,2004). Siswa putus sekolah usia 10-14 tahun, perempuan 36,2 persen dan laki-laki 32,1 persen (BPS,2003). Di bidang kesehatan, angka kematian ibu (AKI) pada

2002/2003 sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Angka ini cukup besar di antara Negara ASEAN lainnya. Jumlah bidan desa yang berkurang menjadi 39.906 orang saja sedangkan rasio tenaga bidan 71:100.000, artinya 71 bidan harus menangani 100.000 perempuan usia reproduksi. Atau bisa juga disebut, satu bidan menangani sekitar 1.400-an perempuan usia reproduksi. Lebih menyedihkan lagi, penurunan itu terjadi seiring dengan kebijakan otonomi daerah. Situasi tersebut mensyaratkan, pemerintah setempat kurang mendukung upaya peningkatan kualitas perempuan di daerah. Seharusnya pembuat kebijakan menyadari, semakin tinggi kualitas perempuan berdampak positif terhadap produktivitas mereka.

Di bidang politik, UU Pemilu menyebutkan kuota 30 persen perempuan di kursi politik. Namun, hasil pemilu 2004 hanya menundukkan 11 persen perempuan di parlemen. Skeptisme terhadap kemampuan masih menjadi hambatan utama perempuan untuk turut mengambil posisi di bidang yang strategis. Kekerasan terhadap perempuan khususnya dalam rumah tangga juga menunjukkan angka yang tinggi baik yang terdata ataupun yang masih belum terungkap. Meskipun, belum tercapai kuota ini, kesempatan dan kemandirian perempuan dalam institusi politik sudah tidak terbatas lagi. Setidaknya dalam satu dekade ini telah mewarnai arena politik. Bahkan di beberapa kota, wanita telah terpilih sebagai Gubernur dan Bupati sebagai presentasi politik publik.

Sebenarnya upaya mewujudkan keadilan gender (PUG), Menurut wisnu ketimpangan gender dapat dinikmati

melalui perbedaan distribusi pendapatan antara laki-laki dan perempuan, menurut provinsi, kabupaten dan kota maupun nasional (Risnu, *gender budget analysis*, 2006; 46). Menurut data UNDP dalam *Gender Index Development* (GDI) angka pemberdayaan gender atau *Gender Empowerment Measure* (GEM) masih sedemikian buruk. Realitas ini menunjukkan terabaikan dalam pembangunan otonomi daerah. Desentralisasi ini pun tidak mengubah keadaan perempuan di daerah meski anggaran daerah telah dikelola masing-masing daerah.

Sensitifitas gender masih rendah terhadap mengupayakan pemberdayaan gender. Hal ini menjadi masalah utama di daerah. Meskipun, dengan berjalannya otonomi daerah, pengangguran terus meningkat dan putus sekolah bagi wanita usia produktif. Sebaliknya, tiga kali sudah dilaksanakan pemilu legislatif, juga belum menunjukkan peran wanita dalam mengentaskan dari keterpasangan-kemiskinan. Sebagaimana menurut Makhmudah bahwa "anggaran politik seharusnya mudah diakses dan dirasakan publik" tak terkecuali para laki-laki.

#### • Rumusan masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas perlu kami merumuskan pertanyaan yang dapat menggambarkan pembahasan masalah utama dalam makalah ini, yaitu:

- Sejauh mana perubahan kaum wanita selama satu dekade transisi reformasi?
- Apa tantangan utama masalah kaum wanita dimasa akan datang?

#### • Landasan Teoritis

Transisi pemerintah Indonesia yang sudah berjalan satu dekade banyak member kontribusi dan wacana terhadap hak gender. Walaupun belum maksimal, setidaknya di era sepuluh tahun telah memberiksn peran gender dalam pembangunan. Tak terkecuali sebagian perempuan menjadi bagian menjadi anggota legislative, walaupun tak sampai pada kuota 30 persen. Berikut beberapa penjelasan teoritis mengenai gender dalam satu dekade atau strategi mewujudkan mengembalikan hak gender.

Menurut Debbi Budlender, kemajuan perempuan tak bisa bergerak dari kesadaran gender itu sendiri tanpa didukung kebijakan yang datang dari inisiasi pemerintah (2006). Salah satunya anggaran sensitive gender. Seperti di jilaskan Budlender dalam pengalamannya sebagai *Community Agency For Social Enquiry*, sebuah organisasi non-pemerintah yang mengkhususkan penelitian. Ia melakukan penelitian 20 negara lebih tentang pemikiran model anggaran sensitif gender menguraikan beberapa langkah dan mengimplementasikannya.

Desentralisasi daerah yang selama ini hanya model anggaran yang mengololasikan dana untuk perempuan, namun tidaklah semudah itu, menurut Budlender hal ini berkaitan dengan paradigma berfiki masyarakat. Isu yang paling menonjol masalah diskriminasi perempuan. Prinsip dasar ini tidak menjadi alasan utama dalam analisis, evaluasi dan mengaudit program kebijakan tersebut. (Budlender, 2006; 104-105).

Tendensi ini terus berlaku bagi kebijakan pemerintah, dengan catatan penting tentang penerapan ini akan dapat menyesuaikan kebutuhan dan dinamika perempuan. Pembilahan data perempuan dan pria penting, bukan disatukan atas nama masyarakat. Kerancuan ini selalu tumpang tindih atas kebijakan yang dilakukan. Seperti di jelaskan Makhmudah, untuk mengantisipasi gizi buruk dan resiko kematian bagi ibu melahirkan penting meningkatkan pelayanan Posyandu melalui anggaran yang di tentukan data setiap tahunnya. Dari hasil pengamatan Makhmudah banyak daerah di lamongan, banyak para bidan atau petugas tidak selalu berada di Posyandu.

Kondisi di atas, sebenarnya mencerminkan di banyak daerah kabupaten kota, banyak fasilitas pemerintah tetapi tenaga medis kurang. Akibat insentif atau honor para staf bahkan dokter umum tidak mencukupi standar pekerja profesional. (Hasil Survey data IDEA Internasional, 2002). Untuk semua keberhasilan kebijakan anggaran dalam perspektif pemberdayaan wanita, ada lima langkah perhatian Budlender dalam gender: *pertama*, situasi pria dan wanita sering terjadi *gap gender*. Atas nama kebijakan pembangunan otonomi daerah selalu mengasosiasikannya dalam nama masyarakat. *Kedua*, kebijakan dan program yang di usulkan harus member pengaruh dan pemanfaatan pada persoalan *gap gender*. *Ketiga*, kebijakan penganggaran harus lebih responsive gender. *Keempat*, mempertimbangkan anggaran yang dialokasikan bagaimana

cara mengelolanya. Karena kelemahan bagi setiap bantuan dalam bentuk uang tunai beresiko tidak tepat sasaran. Sehingga pemberian dilakukan dalam bentuk ketrampilan yang sesuai dengan bahan yang tersedia di lingkungan. *Kelima*, mempertimbangkan dampak kebijakan budget, apa dan bagaimana manfaatnya di rasakan. Bila tidak maka perlu alternative baru di perlukan dalam menentukan kebijakan pemberdayaan wanita.

Gerakan gender selama ditetapkan UU Otda No 32/2004 dan 33/2004, berkaitan dengan pemberdayaan perempuan, masih jauh dari terwujudnya kesetaraan dalam melibatkan gender kearah mainstream perempuan. Misalnya di kabupaten tanah laut, Yudi Irlang menjelaskan bahwa setiap musrembang (musyawarah rencana pembangunan), mengapa perempuan tidak di libatkan? Sekretaris BAPPEDA menjawab bahwa laki-laki saja banyak tidak datang apalagi perempuan. Keadaan ini menyatakan adanya sifat *sensitive gender* belum menyadari adanya kesetaraan hak gender dan maskulin. (2006; 88-89). Yuda memberi contoh bagaimana kesadaran *gender mainstreaming*, sebagai suatu strategi perceptan dan peningkatan perempuan akan terujud kesetaraan dan keadilan, sebagai matra kerja-dalam ranah public maupun domestic, namun seringkali dianggap salah-pengertian bahwa sebagai bentuk persaingan perempuan terhadap lelaki.

Seiring berjalannya otda dalam isu anggaran belanja yang responsive terhadap gender dalam satu dekade terakhir ini, Blender dan Guy Hewwit mencoba menjelaskan dalam bukunya

*Engendering Budget*, dalam rekomendasi bukunya ini mengatakan bahwa peran perempuan tak bisa diabaikan dalam pengentasan kemiskinan dan kebijakan pemerintah tentang gender. Tanpa ini, kedaulatan demokrasi akan terukur sepanjang masa. Berangkat dari pernyataan ini sebenarnya jelas bahwa kendala utama permasalahan ini adalah para pembuat keputusan yang berkaitan dengan public.

Meskipun dalam UU No.23/2003 tentang pemilu menyebutkan kuota 30 persen, yang di harapkan mampu memperhatikan keterwakilan perempuan di legislatif dalam proses pengambilan keputusan public, akan tetapi masih berjalan panjang dan terjegal proses pengambilan keputusan public, akan tetapi masih berjalan panjang dan terjegal dalam internal npartai yang di lakukan tidak secara demokratis dalam hal proses rekrutmen calon legislatif. Jadi bukan tidak ada kesempatan itu tapi anggapan akan menjadi saingan antr anggota, bukan berdasarkan prinsip kesetaraan.

Kendala ini secara teoritis terdapat adanya kesalahan pahaman tentang gender yang hanya diartikan "perempuan" maka alokasi dana kebijakan anggaran pembangunan rendah, masuk keanggaran posyandu. Sementara konsepsi pengertian gender sebenarnya adalah masalah kesetaraan hak. Seperti dijelaskan Yuda, di kabupaten Tapin Kalimantan Selatan pada tahu 2004. Alokasi dana perempuan dan anak bayi sebesar 1 Miliar sementara pendapatan asli daerah 8 Miliar. Karena hasilnya kurang jelas tahun itu maka tahun

2005 dikurangi menjadi 800 juta (Yuda, 2006: 93).

## • **Pembahasan**

Fenomena gender dalam hal meningkatkan dan memberdayakan penting untuk mengungkapkan, kapasitas kelembagaan yang terbuka dan mendukung terhadap kiprah perempuan sangat diperlukan dalam rangka implementasi keterlibatan gender dalam pembangunan. Menurut UNDP, mengajukan enam syarat, yakni: *pertama*, pemahaman dan komitmen. Menurut Muhadjir ketimpangan sosial ini akibat hierarki patriaki dalam relasi sosial sehingga menciptakan kesenjangan partisipasi perempuan membuat rendahnya kualitas hidup perempuan (Lihat Muhadjir, 2005; 58). Untuk mengatasi pokok persoalan ini, yang juga terjadi di beberapa Negara Asia Tenggara, pertimbangan dalam konvensi PBB HAM membuat peraturan dalam mengikut-sertakan perempuan dalam partisipasi pengambilan keputusan. Harapannya agar orientasi kebijakan budgeting mengarah dalam pemberdayaan perempuan. (lebih jauh mendetail lihat lampiran).

Kejelasan tujuan kesetaraan gender dalam pembangunan level pembuat kebijakan dan birokrasi tingkat pelaksana di lapangan, serta komitmen untuk pencapaian tujuan tersebut baik secara individu maupun kelembagaan. *Kedua*, struktur dan mekanisme. Jaminan prespektif gender terliput dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pemerintahan. Juga pelibatan lintas sektoral, monitoring kemajuan dan peran lembaga yang memegang tanggung jawab untuk tercapainya isu

perempuan dalam pembangunan. *Ketiga*, data informasi dan penelitian. Tersedianya input yang diperlukan seperti penelitian tentang situasi perempuan data lengkap berdasarkan jenis kelamin untuk mendukung rumusan kebijakan dan program. *Keempat*, keterampilan perencanaan, analisis dan manajemen. Untuk mengidentifikasi dan menjawab perkembangan isu perempuan berkaitan dengan lembaga yang berwenang. *Kelima*, mekanisme partisipasi. Sedapat mungkin melibatkan partisipasi perempuan atau memalau perwakilannya dalam rancangan pembuatan kebijakan, perumusan dan penilaian program. Keenam, sumberdaya keuangan. Tersedianya dana untuk implementasinya.

Disamping itu keberpihakan masih lambatnya pemerintah memacu kualitas sumber daya perempuan, penataan kembali hak perempuan, penataan kembali hak perempuan dalam mendorong upaya tersebut bisa kita lihat dengan terbitnya, paling tidak empat produk hukum yang cukup berpihak pada perempuan yakni : disahkannya UU No 23/2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT); UU No 90/2005 tentang kewarganegaraan; UU Pemilu 2004 yang memberi kuota 30 persen kepada perempuan untuk dicalonkan dalam pemilu; Inpres No 9/2000 tentang peran wanita dalam pembangunan.

Tantangan terbesar perempuan Indonesia kedepan adalah memainkan peran ganda sekaligus, yaitu karir dan rumah tangga. Dimana peran mereka harus menjadi penopang utama dalam

keharmonisan keluarga. Selain itu, karir wanita dituntut lebih profesional. Kecerdasan dan keluwesan perilaku menjadi sandaran utama dalam membentuk karir. Sayangnya, banyak di tempat kerja belum siap menerima keadaan kaum wanita seperti ini. Kecendrungan daya tarik wanita selalu ditanggapi dengan pelecehan seksual atau cara pandang yang mengasosiasikan *sex appeal*. Seiring waktu kognisi orang lain akan tersandakan bahwa baik perempuan maupun pria mempunyai hak yang sama dalam pembuatan keputusan. Menurut Gadis bahwa selama ini wanita hanya dijadikan objek seks, tubuh dan pikirannya hanya dieksploitasi dengan seks.

Dalam perkembangan pembangunan yang semakin pesat ini, semua elemen masyarakat dituntut untuk berapaku dalam memperoleh penghidupannya yang layak, tidak memandang jenis kelamin. Kaum perempuan yang "lebih lemah" jika dibandingkan dengan laki-laki pun tidak jarang harus berkompetisi dengan laki-laki dan pada akhirnya perlakuan yang tidak adil pun diterima oleh pihak perempuan dengan alasan gender. Padahal, gender tidak dapat disamakan dengan jenis kelamin walaupun memang gender tubuh karena faktor jenis kelamin. Gender lebih ditekankan pada sifat maskulin atau feminin yang memang sudah ditekankan dari manusia lahir atau bangun biologis dasar yang merupakan budaya manusia itu sendiri. Gender lebih ditekankan pada peran sosial dan bukanlah peran biologis karena gender lebih menjelaskan pada hubungan antara perempuan dan laki-laki serta penentuan

posisi keduanya dianggap sangat penting. Dengan gender itu pulalah pembedaan perempuan dan laki-laki terhadap akses sumber daya, pekerjaan, akses umum dilakukan. Pembagian antara kegiatan internal rumah dan eksternal rumah merupakan respon adanya gender tersebut. Perempuan lebih "ditekankan" pada kegiatan dalam ruang lingkup rumah sedangkan laki-laki terhadap akses sumber daya, pekerjaan, akses umum dilakukan. Pembagian antara kegiatan internal rumah dan eksternal rumah merupakan respon adanya gender tersebut. Perempuan lebih "ditekankan" pada kegiatan dalam ruang lingkup rumah sedangkan laki-laki bekerja untuk mendapatkan penghasilan diluar rumah. Ataupun jika memang perempuan ikut bekerja dalam rumah tangga tersebut, maka posisi perempuan hanyalah dipandang sebagai pencari nafkah sekunder. Ketika memang tenaga ataupun waktunya sangat dibutuhkan dalam rumah tangga, maka dia harus dengan sukarela meninggalkan pekerjaannya di luar rumah. Dalam hal ini maka lelaki tetaplah menjadi actor utama dalam mencari nafkah. Akan sangat berbeda jika dalam rumah tangga tersebut tidak ada elemen laki-laki. Pada rumah yang hanya terdapat ibu dan anaknya karena suami meninggal atau cerai, atau perempuan yang memang belum menikah, maka perempuan yang memikul tanggung jawab dalam mencari nafkah baik untuk mencukupi kebutuhannya maupun kebutuhannya keluarganya. Realita tersebut merupakan hal yang biasa yang terjadi pada saat ini.

Kesetaraan gender yang memang di gaungkan pada era akhir-akhir ini. Hal ini dimaksudkan agar timbul adanya keadilan antar laki-laki dan perempuan terhadap berbagai macam akses yang ada di lingkungan baik akses sosial, pendidikan, pekerjaan maupun akses-akses lainnya. Akan tetapi, penyetaraan peran gender di ruang yang nyata bukanlah pekerjaan yang gampang. Masyarakat sulit untuk menerapkan peran gender karena masih kentalnya budaya patriarki. Pada masyarakat terutama masyarakat tradisional. Sehingga jika menolak ketidakadilan gender berarti merupakan penentangan terhadap budaya dan akan tentu juga mengancam kehidupan sosialnya dalam masyarakat.

#### • **Perempuan dalam pekerjaan**

Untuk mencukupi kebutuhan hidup yang semakin membengkak, tidak jarang perempuan memainkan perannya dalam mencari penghasilan, baik sebagai actor utama maupun sekedar menambah penghasilan keluarga. Lapangan kerja yang tidak berkembang sesuai dengan angkatan kerja menimbulkan persaingan yang ketat dalam memperoleh pekerjaan. Hal ini tidak hanya terlihat di kota-kota besar yang padat penduduknya, akan tetapi hal yang tidak berbeda juga terjadi di pedesaan. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa mencari pekerjaan di kota besar lebih mudah jika dibandingkan dengan pedesaan. Akan tetapi jika memang tidak mempunyai pendidikan, pengalaman dan keterampilan yang cukup maka pekerjaan yang didapat tentu akan sulit diperoleh. Dengan jumlah pencari kerja

yang terus membengkak, maka pengangguran juga semakin banyak.

Pekerja di perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan manufaktur, lebih menyukai pekerja (buruh) perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan akan lebih teliti dalam bekerja dengan sifat kewanitaan inilah perusahaan dapat menekan kerugian dengan semakin sedikitnya produk yang tidak lolos control kualitas (quality control) disamping itu, pekerja perempuan dipilih karena mereka lebih mudah di atur, patuh pada perusahaan, tidak mudah bersedikit dan yang paling penting, upah buruh perempuan lebih murah jika dibandingkan dengan buruh laki-laki. Anggapan murah ini karena biasanya perempuan yang diperkerjakan di perusahaan adalah perempuan yang tidak terlatih. Walaupun mereka melamar diperusahaan sebagai tenaga terlatih akan tetapi tetap saja mereka dibayar sebagai pekerja yang tidak terlatih. Dan ketika mereka sudah mahir dalam pekerjaannya, mereka diberhentikan dan merekrut lagi pekerja baru. Hal ini dilakukan untuk menekan ongkos produksi karena pekerja yang terlatih tentu mempunyai upah yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pekerja tidak terlatih. Bahkan beberapa perusahaan menerapkan aturan, tidak mengangkat pekerja tetap, buruh bekerja dengan sistem kontrak selama 6 bulan dan hanya dapat diperpanjang satu kali, sehingga buruh yang bekerja di perusahaan tersebut hanya dapat bekerja selama satu tahun saja. Jika perempuan yang bekerja dengan "cap" sebagai pekerja tidak terlatih, maka tentu saja mereka berada pada tingkatan pekerja yang paling bawah,

dengan jam kerja yang relatif banyak akan tetapi upah yang didapat sangat minim dan tidak jarang buruh perempuan ini menambah jam kerja (lembur).

Pengaruh perempuan yang bekerja terhadap kualitas hidup keluarga juga sangat terasa bagi keluarga tersebut. Dorongan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar juga mendorong banyak perempuan untuk terjun dalam pekerjaan. Beberapa alasan mengapa perempuan semakin banyak bekerja:

- Wanita yang bekerja akan menambah penghasilan keluarga
- Setiap perusahaan biasanya menyediakan jaminan sosial secara langsung dan tidak langsung dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya seperti koperasi karyawan, program keluarga berencana, dll.
- Akses pekerja terhadap pelayanan kesehatan lebih besar dari akses non pekerja
- Disamping pelayanan kesehatan di tempat kerja, sebagian besar perusahaan mempunyai program jaminan kesehatan melalui asuransi kesehatan atau jaminan pembayaran kembali keseluruhan atau sebagian biaya kesehatannya telah dikeluarkan.

Persaingan yang semakin ketat menimbulkan semakin banyak perempuan yang tidak mendapatkan kesempatan kerja. Semakin lama dia tidak bekerja, maka akan semakin sulit baginya untuk mendapatkan pekerjaan lagi. Pada perempuan-perempuan yang pendek jalan pemikirannya, mereka mengambil jalan pintas untuk

memperoleh uang dengan jalan menjual jasa seksualnya. Mereka menjadi pekerja seks komersial (PSK) baik secara terang-terangan maupun hanya sambilan. Padahal, resiko menjadi PSK bukanlah tidak ada. Ancaman mendapat kekerasan fisik dan mental selalu mengintai. Jam kerja yang tidak lazim bagi wanita, yaitu malam sampai pagi hari dan berada di lingkungan laki-laki merupakan keseharian yang harus dijalani. Tekanan dari aturan yang membuat mereka selalu waspada pada operasi penertiban yang sering dilakukan juga merupakan kendala dalam "bekerja". Ditambah lagi, ancaman terhadap penyakit kelamin yang sengaja atau tidak sengaja ditularkan oleh "konsumen". Bahkan penyakit yang konon belum ada obatnya, HIV-AIDS merupakan penyakit yang sangat dekat dengan kehidupan mereka.

Akan tetapi tidak semua perempuan berminat atau berkesempatan dalam dunia kerja. Mereka umumnya menikmati kehidupannya dalam rumah tangga. Menerima status sebagai ibu rumah tangga merupakan hal yang wajar bagi mereka. Disamping itu, menurut Wardiman Djojonegoro, beberapa kendala bagi wanita yang ingin berkarir adalah:

- Peranan alamiah wanita sebagai ibu rumah tangga dalam sudut pandang budaya yang sempit menyebabkan prospek pengembangan karier wanita belum memperoleh dukungan masyarakat secara luas
- Pengembangan karier wanita dalam lembaga-lembaga pemerintahan belum optimal karena pegawai wanita yang telah menikah selalu

memiliki status "ikut suami" sehingga mobilitas kerjanya relative terbatas

#### • **Perempuan dan pendidikan**

Salah satu keterbatasan perempuan dalam bekerja dan kalah dalam persaingan adalah karena pendidikan yang diperoleh perempuan lebih terbatas. Dengan alasan bahwa akhir pendidikan anak perempuan adalah dapur, maka tidak jarang anak perempuan lebih sedikit mendapatkan pendidikan normal jika dibandingkan dengan laki-laki. Menurut NGO Womenkind, kendala pendidikan perempuan dapat dikategorikan menjadi tiga macam yaitu iklim ekonomi, sikap sosial dan lingkungan sekolah. Kendala ekonomi merupakan faktor yang sudah umum, dimana orang tua dengan ekonomi menengah bawah akan berpikir berulang kali jika berniat menyekolahkan anaknya, apalagi jika yang di sekolahkan adalah anak perempuan. Anggapan bahwa anak laki-laki suatu saat akan membantu orang tua (keluarga) dalam hal finansial menyebabkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan semakin besar, dan jika memang keadaan ekonomi keluarga kurang mendukung maka kesempatan anak perempuan untuk memperoleh pendidikan jadi semakin sempit. Faktor sosial juga ikut berperan dalam menyempitkan kesempatan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Perempuan dilarang sekolah agar orang tua tidak terbebani dalam mengurus rumah. Sedangkan kendala yang di timbulkan oleh lingkungan sekolah yaitu bahwa pendidikan yang di lakukan sekarang sudah menjurus pada diskriminasi gender. Perlakuan terhadap perempuan

dan laki-laki sudah dibedakan dengan tujuan keadilan. Pendidikan perempuan ditekankan pada pekerjaan yang nantinya mendukung tugasnya dalam rumah tangga sedangkan pendidikan untuk anak laki-laki ditekankan pada usahanya untuk mendapat atau menciptakan pekerjaan.

Pengakuan gender sebagai hal yang sangat penting dan tidak dapat di tunda tunda lagi sudah dimulai pada era dasawarsa ini. Bahkan pendidikan yang khusus mendalami tentang gender juga sudah di terapkan, yaitu melalui kurikulum fakultas hukum sebagai sarana untuk memperkenalkan perspektif gender dalam pengajaran yang di canangkan oleh *Convention watch*.

• **Perempuan yang berorganisasi**

Seiring berjalanya waktu, perempuan di Indonesia juga berperan dalam organisasi kemasyarakatan maupun pada level negara. Keinginan perempuan untuk berorganisasi pada tataran yang lebih luas merupakan salah satu pendorong utamanya. Tidak cukup hanya memerankan politik secara tradisional, akan tetapi juga mulai aktif memperjuangkan kepentingan umum atau kepentingan kelompoknya melalui lembaga sosial atau lembaga politik. Bahkan tidak jarang mereka menyalurkan kepentingannya melalui saluran non konvensional, seperti unjuk rasa atau demonstrasi.

Menurut dawn (2000), sekurang-kurangnya ada enam macam organisasi yang berbeda mulai dari yang sangat tradisional hingga organisasi dengan analisis dan agenda feminis khusus.

- Organisasi perempuan tradisional: organisasi ini cenderung berkuat di sekitar peran gender tradisional. Sebagian besar didukung oleh perempuan kelas menengah. Sebagian besar didukung oleh perempuan kelas menengah. Kekuatannya terletak dalam akses mereka terhadap sumber daya dan pembuat keputusan kendati mereka mungkin tidak selalu mengeksploitasi jalannya ini.
- Kelompok yang berafiliasi pada partai politik: organisasi ini memiliki persoalan dalam menegakkan agendanya sendiri yang bersumber dari kekhawatiran dianggap memecah belah.
- Organisasi yang berbasis pekerja, termasuk serikat buruh dalam sektor formal dan organisasi perempuan miskin: mereka biasanya memusatkan perhatian kepada masalah-masalah seperti kondisi pekerjaan serta tersedianya kredit, tetapi kemudian melangkah ke agenda geminis yang lebih eksplisit seperti pengasuh anak, pelecehan seksual di tempat kerja dsb. Dawn berpendapat bahwa organisasi semacam ini cukup berhasil memberdayakan perempuan miskin dalam kehidupan pribadinya.
- Organisasi yang berkibar sejak dasawarsa perempuan PBB diluncurkan, yang muncul dari pendanaan proyek, koperasi kredit, proyek peningkatan pendapatan inisiatif lainnya bagi perempuan miskin : kebanyakan organisasi ini mengalami kelemahan structural dan pendekatan dari atas ke bawah (top-down).

- Organisasi akar rumput: cenderung melihat isu-isu seperti kesehatan, pemberantasan buta huruf, kekerasan, hukum dan persoalan politik yang lebih luas.
- Organisasi penelitian dan sumber daya: organisasi ini benar-benar memiliki kesempatan mempengaruhi perdebatan kebijakan umum dan member masukan kepada kerja lembaga dan pemerintah pemberi dana internasional.

Perempuan yang berorganisasi merupakan titik tolak terhadap karier perempuan yang terjun dalam dunia politik. Perempuan yang berperan dalam politik. Perempuan yang berperan dalam politik dan masuk dalam jajaran legislatif, walaupun belum dapat dikatakan dalam jumlah banyak, akan tetapi selalu ada dalam tiap periodenya. Sebagai contoh, keterwakilan perempuan di DPR-RI pada periode 1999-2004 sebesar 9%, sedangkan jumlah perempuan yang menjadi DPRD provinsi di seluruh Indonesia rata-rata 5,8% dan tidak ada yang lebih dari 13,3%. Hal ini masih dapat dibanggakan walaupun masih jauh dari yang. Beberapa hambatan yang dimiliki oleh perempuan dalam peran sertanya dalam bidang politik yaitu :

- Pengaruh dari masih mengakarnya peran dan pembagian gender antar laki-laki dan perempuan di bidang kepemimpinan dan pembuatan kebijakan atau keputusan.
- Kendala-kendala kelembaga (institusional) yang masih kuat atas akses perempuan terhadap kekuasaan yang terbesar di berbagai kelembagaan sosial politik.

## • Kesimpulan

Perempuan pada saat ini sudah banyak memainkan perannya. Keterlibatan perempuan dalam pembangunan memang tidak dapat dipungkiri kebenarannya baik secara langsung dalam baik secara formal maupun non formal maupun dukungan pada suami jika memang suaminya merupakan pejabat publik. Keterlibatan perempuan secara langsung memang lebih pada pemenuhan kebutuhannya yaitu untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Akan tetapi keterlibatan pemerintah yang memang merupakan pihak yang menentukan arah kebijakan pembangunan belum sepenuhnya berada pada sisi perempuan. Ketidakberpihakan kebijakan tidak jarang justru malah menghambat kesetaraan gender itu sendiri.

Peningkatan peran perempuan dalam setiap segmen kegiatan pembangunan memang memerlukan pengorbanan baik oleh perempuan maupun keluarga sebagai orang-orang yang berhubungan langsung dengannya. Disamping itu, dukungan dari lingkungan sekitar yang harus selalu melindungi perempuan yang memang lemah secara fisik, dan dukungan kebijakan yang selalu mendukung perempuan dalam artian kesetaraan gender merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Akibat dari dukungan tersebut tentu akan terlihat pada peningkatan provinsi ataupun aktivitas perempuan dalam setiap kegiatan yang memang memerlukan sisi kelebihan perempuan.

• **Daftar Pustaka**

- Al-Hibri, Azizah dkk. 2001. *Wanita dalam Masyarakat Indonesia: Akses, Pemberdayaan dan Kesempatan*. Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.
- Aris Arief Mudayat, Edriana Noerdin, Sita Aripurnami. 2006. *Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender*. Kemitraan Patnership dan Women Research Institute.
- Julia Cleves Mosse. 2002. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jurnal Perempuan. Edisi 40. 2005
- Jurnal Perempuan. Edisi 46. 2006
- Konvenan Internasional PBB tentang Hak-hak Sipil dan Politik.
- Konvensi Internasional PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tanggal 18 Desember 1979.
- Liza Hadizh, ed., 2004. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru, Pilihan Artikel Prisma*, LP3ES
- LP3ES. 2004. *Perempuan dalam Wacana Politik Orde Baru: Pilihan Artikel Prisma*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Moore, Henrietta L. 1988. *Feminism and Anthropology*. Cambridge: Polity Press
- \_\_\_\_\_, 1994. *Passion for Differences: Essay In Anthropology and Gender*. Cambridge: Polity Press.
- Mosse, Julia Cleves. 1996. *Gender dan Pembangunan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhadjir M. Darwin, 2005. *Negara dan Perempuan: Reorientasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Penerbit Grha Guru
- Nur Iman Subono, 2003. *Perempuan dan Partisipasi Politik*. Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan
- Sulistyowati Irianto, Achie Sudiarti Luhulima, 2004. *Kisah Perjalanan Panjang Konvensi Wanita di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

